



Judul : Saran Komisi II DPR, petugas ATR jemput bola urus tanah korban bencana
Tanggal : Minggu, 21 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Saran Komisi II DPR Petugas ATR Jemput Bola Urus Tanah Korban Bencana

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta menggratiskan seluruh layanan pertanahan masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Negara wajib hadir dengan pelayanan yang cepat dan simpel bagi para korban.

Anggota Komisi II DPR Indrajaya mengatakan, kebijakan layanan gratis ini mencakup penerbitan sertifikat pengganti bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen. "Jangan menunggu masyarakat mengurus sendiri. Kalau bisa, petugas ATR/BPN turun langsung ke rumah-rumah korban," ujarnya.

Dokumen tanah yang rusak dan hilang akibat banjir, menurutnya, jadi masalah serius. Kementerian ATR/BPN perlu melakukan pendataan ulang secara proaktif, termasuk membuka pos layanan khusus pertanahan di wilayah terdampak bencana.

Dia menjelaskan, salah satu persoalan paling serius pasca-bencana adalah hilangnya batas dan identitas bidang tanah. Patok batas bisa hilang atau bergeser, kontur tanah berubah karena ambles, retak, atau terangkat. Akibatnya, bidang tanah tidak lagi dapat diidentifikasi dengan jelas.

Kondisi ini sangat dirasakan terutama petani. Batas sawah hilang, sehingga tanah tidak bisa diukur ulang dan berpotensi memicu sengketa antarwarga. "Kalau ini tidak segera ditangani, konflik agraria di tingkat lokal bisa meningkat," tegas polikus asal Papua Selatan itu.

Sebagai langkah pencegahan,

Indrajaya juga mengusulkan adanya moratorium dan pengawasan ketat terhadap jual beli tanah di wilayah pascabencana. Tujuannya melindungi korban agar tidak kehilangan hak atas tanahnya karena tekanan ekonomi atau ketidakjelasan status lahan.

"Sertifikat gratis adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak dasar rakyat. Di situasi ini, urusan pertanahan harus jadi bagian pemulihan, bukan sumber masalah baru," ingatnya.

Selain pada Kementerian ATR/BPN, Indrajaya juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun membantu korban bencana dalam pengurusan KTP, kartu keluarga, dan surat-surat administrasi lainnya. Prosesnya bisa melalui Pemda dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. "Semua harus digratiskan dan dipermudah. Jangan ada korban bencana yang justru terbebani biaya dan prosedur rumit," ujarnya.

Senada, anggota Komisi II DPR Cindy Monica meminta negara mempermudah proses pengurusan dokumen warga terdampak musibah di Sumatera. Mulai dari dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya.

Dia meminta ada layanan khusus tanpa biaya agar masyarakat bisa segera mengurus dokumen mereka. "Banyak warga yang kehilangan seluruh dokumennya. Dalam kondisi bencana seperti ini, pengurusan ulang seharusnya dipermudah dan dipercepat," kata Cindy. ■ **PYB**